

RINGKASAN

Irfan Muzni ANALISIS FAKTOR PENYEBAB
NIM 227410101006 MENINGKATNYA CERAI GUGAT DI
 MAHKAMAH SYAR'IAH TAKENGON

(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., Hum dan Dr. Herinawati, S.H., M.Hum)

Hukum menjadi prinsip dasar bagi Negara Indonesia menyebabkan adanya penekanan bahwa cerai gugat merupakan suatu proses yang tidak dianggap ringan. Regulasi terkait dengan perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan). Proses perceraian yang diatur melalui Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, diharuskan melalui mekanisme yudisial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab, pertimbangan hakim dan upaya yang dilakukan terhadap meningkatnya cerai gugat di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder karena merupakan penelitian yuridis-empiris melalui wawancara terhadap responden dan informan. Analisis data dalam penelitian ini yaitu semua data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang diteliti terkait analisis faktor penyebab meningkatnya cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya cerai gugat di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2022 disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti faktor ekonomi, perjudian, KDRT, kurangnya pemahaman agama, dan perselingkuhan dari media sosial, yang mengakibatkan perselisihan dalam rumah tangga. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat didasarkan pada tiga prinsip: filosofis, yuridis, dan sosiologis, dengan tujuan memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat. Upaya yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam menekan angka perceraian melibatkan peran hakim dan mediator dalam mendamaikan para pihak, serta memberikan sosialisasi dan informasi publik untuk mencegah perceraian. Sementara itu, MPU Aceh Tengah dan Kepala Desa (Reje) juga aktif memberikan sosialisasi, bimbingan, dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pernikahan dan akibat perceraian sebagai upaya pencegahan.

Disarankan kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan guna mengatur tahapan persiapan perkawinan, yang dapat mencegah cerai gugat akibat kurangnya kesadaran suami-isteri. Kepada Desa/Reje, MPU, dan KUA, diperlukan bimbingan pra nikah, mediasi, dan peningkatan kompetensi aparatur desa dalam mediasi untuk menekan angka cerai gugat. Mahkamah Syar'iyah perlu mempertahankan upaya-upaya mendamaikan para pihak dan memberikan kesempatan mediator non-hakim untuk mendorong penyelesaian damai.

Kata kunci: Cerai Gugat, Mahkamah Syar'iyah, Faktor Penyebab

ABSTRACT

Irfan Muzni

NIM 227410101006

ANALYSIS OF THE CAUSES OF INCREASING DIVORCE PETITIONS IN THE SHARIA COURT OF TAKENGON

(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., Hum dan Dr. Herinawati, S.H., M.Hum)

The law, being a fundamental principle of the Indonesian state, underscores that divorce litigation is not a process to be taken lightly. Regulations concerning divorce are governed by Law No. 16 of 2019, which amends Law No. 1 of 1974 on Marriage (hereinafter referred to as the Marriage Law). The divorce process, as stipulated in Article 39, paragraph (1) of the Marriage Law, requires a judicial mechanism.

This research aims to identify and analyze the causal factors, judicial considerations, and efforts undertaken in response to the increasing number of divorce litigations in the jurisdiction of Mahkamah Syar'iyah Takengon. This study is an empirical juridical research. The data sources for this research are secondary data, obtained through empirical juridical research by conducting interviews with respondents and informants. The data analysis involves systematically organizing all collected data and performing a qualitative analysis to clarify the issues being investigated, particularly the analysis of the factors contributing to the rise in divorce litigations in Mahkamah Syar'iyah Takengon.

The results of this study indicate that the occurrence of divorce litigations in the jurisdiction of Mahkamah Syar'iyah Takengon in 2022 is caused by several factors, including economic issues, gambling, domestic violence, lack of religious understanding, and infidelity facilitated by social media, all of which lead to household disputes. Judicial considerations in granting divorce litigations are based on three principles: philosophical, juridical, and sociological, with the aim of providing justice, certainty, and benefit to the parties involved. Efforts undertaken by Mahkamah Syar'iyah Takengon to reduce the divorce rate include the roles of judges and mediators in reconciling parties, as well as public outreach and information dissemination to prevent divorces. Meanwhile, the MPU of Central Aceh and village heads (Reje) also actively provide socialization, guidance, and counseling to the community regarding marriage and the consequences of divorce as preventive measures.

It is recommended that lawmakers revise the Marriage Law to regulate pre-marriage preparation stages, which can prevent divorce litigations due to the lack of awareness among spouses. For village heads (Reje), MPU, and KUA, pre-marital counseling, mediation, and the enhancement of village officials' competence in mediation are needed to reduce the divorce litigation rate. The Mahkamah Syar'iyah should maintain efforts to reconcile parties and provide opportunities for non-judge mediators to encourage peaceful settlements.

Keywords: Divorce Petitions, Sharia Court, Causes of Divorce